

Kajian *Community-Based* pada Pengelolaan Ekowisata Mundupesisir, Kabupaten Cirebon

Feti Fatimatuzzahroh^{1*}, Windra Yuniarsih², dan Dheni Dwi Pangestuti³

¹Magister Studi Lingkungan, Universitas Terbuka; e-mail: feti.fatimatuzzahroh@ecampus.ut.ac.id

²Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas Halim Sanusi, Bandung, Indonesia

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama, Cirebon, Indonesia

ABSTRAK

Ekowisata mangrove berbasis komunitas merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan konservasi ekosistem pesisir dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi struktur pengelolaan ekowisata mangrove, konflik tata kelola antar-stakeholder, serta dampak sosial-ekonomi dan ekologisnya pada ekowisata mangrove di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pengelolaan Ekowisata Mangrove Kasih Sayang Mundupesisir (MKSM), Kabupaten Cirebon, yang memiliki keunikan berupa dualisme kelembagaan antara Pokmaswas (konservasi) dan Pokdarwis yang merupakan bagian dari BUMDes (pariwisata), dengan mengidentifikasi karakteristik pengelolaan berbasis komunitas, konflik kepentingan antar-aktor, serta dampak pengelolaan pada dimensi sosial-ekonomi dan ekologi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui in-depth interview terhadap 9 informan kunci yang dipilih secara purposive, meliputi ketua dan anggota Pokmaswas, Pokdarwis, BUMDes, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan penjaga tiket ekowisata, serta observasi nonpartisipan dan studi dokumen. Analisis data menggunakan pendekatan tematik-induktif dengan tahap open coding, axial coding, dan selective coding. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MKSM menerapkan model pengelolaan co-management hibrid yang memadukan authentic ecotourism dan community-based tourism, dengan struktur tata kelola ganda yaitu Pokmaswas (Kelompok Pengawasan Komunitas) mengawasi konservasi, sementara Bumdes (Perusahaan Milik Desa) melalui Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) mengelola kegiatan komersial ekowisata yang belum diformalkan dalam regulasi desa. Terdapat gap kelembagaan yang signifikan, namun pembagian peran dan kewenangan tersebut belum dilegalformalkan sehingga menciptakan konflik yang menghambat perkembangan ekowisata. Temuan ini memberikan kontribusi berupa model co-management ekowisata mangrove dengan dualisme kelembagaan formal-informal yang relevan bagi pengembangan community-based ecotourism di kawasan pesisir Indonesia.

Kata kunci: co-manajemen, kajian community-based, pengelolaan ekowisata, konservasi mangrove, ekowisata mangrove, Mundupesisir

ABSTRACT

Community-based mangrove ecotourism integrates coastal ecosystem conservation with local economic empowerment, yet studies on management structures, governance conflicts, and socio-ecological impacts in Indonesia remain limited. This study analyzes the management model of Kasih Sayang Mangrove Ecotourism Mundupesisir (MKSM), Cirebon Regency, which exhibits institutional dualism between Pokmaswas (conservation-oriented community monitoring group) and Pokdarwis operating under the Village-Owned Enterprise (BUMDes) (tourism-oriented). The study identifies characteristics of community-based management, actors' conflicts of interest, and socio-economic and ecological impacts. A qualitative case study design was used. Data were collected through in-depth interviews with nine purposively selected key informants (leaders and members of Pokmaswas, Pokdarwis, BUMDes, the village head, village secretary, and ticketing staff), complemented by non-participant observation and document analysis. Thematic-inductive analysis proceeded through open, axial, and selective coding. Data validity was ensured by source and method triangulation. Findings show MKSM implements a hybrid co-management model combining authentic ecotourism and community-based tourism, characterized by a dual governance structure: Pokmaswas oversees conservation while BUMDes, via Pokdarwis, manages commercial ecotourism operations. This arrangement lacks formalization in village regulation, producing an institutional gap: roles and responsibilities are clear but legally unrecognized, causing recurring conflicts that hinder ecotourism development. Ecologically, mangrove species diversity increased from 2021 to 2023 but declined in 2024, indicating emerging conservation pressures requiring immediate attention. The study contributes theoretically by proposing a co-management model of mangrove ecotourism marked by formal-informal institutional dualism, which is relevant for developing community-based ecotourism in Indonesia's coastal regions.

Keywords: co-management, community-based ecotourism, mangrove management, mangrove conservation, mangrove ecotourism, Mundupesisir

Citation: Fatimatuzzahroh, F., Yuniarsih, W., dan Pangestuti, D. P. (2026). Kajian *Community-Based* pada Pengelolaan Ekowisata Mundupesisir, Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 24(2), 315-327, doi:10.14710/jil.24.2.315-327

1. PENDAHULUAN

Mangrove merupakan salah satu sistem alam di dunia yang paling beragam dan signifikan secara biologis (Akram *et al.*, 2023). Ekosistem mangrove menyediakan berbagai macam barang dan jasa untuk komunitas pantai yang berdekatan dengan mangrove dan daerah sekitar lainnya baik di daerah tropis maupun subtropis (Mafaziya Nijamdeen *et al.*, 2024). Jasa ekosistem mangrove secara biologis diantaranya adalah sebagai tempat berlindung bagi larva air, area buffer atau penyangga terhadap erosi pesisir, dan penyimpanan karbon (Swangiang & Kornpiphat, 2021). Selain mengumpulkan biomassa hidup, mangrove juga bertindak sebagai sumur karbon dengan menumpuk sampah dan kayu mati, serta dengan menangkap sedimen yang dibawa dari dataran tinggi (Mohamed *et al.*, 2023). Mangrove menyimpan lebih banyak karbon per unit area daripada hutan lainnya yaitu sekitar 3–5 kali lipat (Mohamed *et al.*, 2023). Mangrove sangat penting untuk melestarikan dan melindungi masyarakat pesisir dan ekosistem di sepanjang pantai (Inoco & Villegas, 2024). Hutan mangrove juga memberikan banyak manfaat sosial-ekonomi untuk komunitas sekitarnya, termasuk sumber kayu untuk bahan bangunan, kayu bakar dan batubara, kertas, pewarna, dan sebagainya (Afifah *et al.*, 2023) (Mafaziya Nijamdeen *et al.*, 2024). Saat ini, mangrove dianggap sebagai ekosistem dengan prioritas tinggi dalam beberapa inisiatif konservasi internasional seperti *Global Mangrove Alliance* dan *International Blue Carbon Initiative* (Come *et al.*, 2023). Lokasi geografis ekosistem mangrove yang berada di pesisir menjadikannya sebagai daya tarik wisata yang bagus (Macamo *et al.*, 2024a) diantaranya adalah dikembangkan sebagai ekowisata mangrove.

Secara umum, ekowisata dianggap sebagai alternatif yang berkelanjutan untuk konservasi mangrove serta pengurangan kemiskinan bagi penduduk setempat (Aji *et al.*, 2024). Ekowisata merupakan kegiatan yang melibatkan kesadaran lingkungan dan didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal (Tien *et al.*, 2024). Ekowisata menawarkan manfaat ekonomi seperti peningkatan pendapatan, kesejahteraan, pendidikan, fasilitas dan infrastruktur yang biasanya tidak dapat dicapai di daerah pinggiran kota yang jauh dari kota (Juliana *et al.*, 2023). Pengelolaan ekowisata mangrove biasanya melibatkan masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan sosial-ekonomi dan ekologi (Macamo *et al.*, 2024a). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Wibisono *et al.*, (2024) bahwa konservasi berbasis komunitas atau *Community-Based Resource Management* (CBRM) adalah upaya yang paling penting dan telah banyak digunakan dalam manajemen sumber daya alam terutama dalam mengelola keberlanjutan kawasan yang dilindungi (Wibisono *et al.*, 2024).

Community-based ecotourism management atau pengelolaan ekowisata berbasis komunitas adalah pelibatan masyarakat pada pengelolaan ekowisata mangrove sebagai wujud keterlibatan masyarakat pada CBRM. Ekowisata berbasis masyarakat (*community-based ecotourism*) telah diakui secara luas sebagai strategi efektif untuk memitigasi kerusakan ekosistem pesisir sekaligus menstimulasi perekonomian lokal di berbagai negara berkembang (Tien *et al.*, 2024; Walter, 2011). Sebagai bagian dari ekosistem global yang menyediakan layanan lingkungan krusial seperti sequestrasi karbon dan perlindungan dari abrasi, mangrove menjadi objek vital dalam pengembangan ekowisata. Dalam konteks ini, model pengelolaan kolaboratif (*co-management*) yang melibatkan kemitraan antara komunitas lokal dan entitas supra-lokal (seperti pemerintah desa atau swasta) sering kali diajukan sebagai solusi ideal untuk mengatasi keterbatasan kapasitas negara dalam pengelolaan sumber daya alam (Damastuti *et al.*, 2022).

Ekowisata Mangrove Kasih Sayang Mundu pesisir (MKSM) di Kabupaten Cirebon merupakan kawasan ekowisata yang diinisiasi oleh masyarakat lokal sejak 2008 sebagai respons terhadap abrasi pantai, dan berkembang menjadi destinasi ekowisata. Kawasan ini mempunyai pengelolaan yang unik yaitu mempunyai pengelolaan ganda (*institutional dualism*) yang melibatkan dua entitas berbeda—Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas konservasi) dan Pokdarwis yang merupakan bagian dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa untuk pengembangan wisata)—dalam satu kawasan mangrove yang sama, tanpa perjanjian pengelolaan formal yang mengatur batas kewenangan masing-masing pihak. Hal ini kemudian memunculkan beberapa tantangan diantaranya adalah pengembangan kawasan yang belum maksimal dikarenakan ada beberapa konflik kepentingan stakeholder yang mengelola kawasan ekowisata tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai kajian *community-based* pada pengelolaan ekowisata mangrove di Mundu kabupaten Cirebon untuk menemukan pengelolaan yang tepat pada ekowisata mangrove Kasih Sayang.

Penelitian terbaru mengenai ekowisata dan konservasi mangrove yang dilakukan oleh Blanton *et al.*, (2024) menyebutkan bahwa keseimbangan antara pembangunan ekowisata dan konservasi mangrove dapat diatasi melalui pendekatan inovatif serta kampanye pendidikan dan kesadaran yang memastikan konservasi mangrove jangka panjang sambil tetap memenuhi kebutuhan ekonomi dan infrastruktur yang terkait dengan kegiatan ekowisata. Penelitian lain menyebutkan bahwa terdapat hubungan kausal antara pembangunan sosial ekonomi, perlindungan keanekaragaman hayati, lingkungan, dan sumber daya alam, serta respons kelembagaan berimplikasi penting bagi kebijakan dan pengelolaan untuk mempromosikan pertumbuhan ekowisata (Tien *et al.*, 2024). Kajian lain menyebutkan bahwa partisipasi komunitas sebagai stakeholder dari

CBET pada proses perencanaan ekowisata merupakan satu hal yang penting untuk mencapai *Sustainable community-based ecotourism* (SCBET) (Zheng *et al.*, 2021). Hal ini menjadi dasar kajian-kajian *community-based* pada ekowisata berdasarkan persepsi, peluang, dan tantangan ekowisata mangrove berbasis masyarakat (Runya *et al.*, 2022), sintesis model pengelolaan ekowisata dan konservasi hutan mangrove dengan partisipasi masyarakat (Treephan *et al.*, 2019), pengembangan potensi *community-based* ekowisata dengan pendekatan jasa lingkungan (Hidayat *et al.*, 2024), model pengelolaan berbasis masyarakat yang bergantung pada masyarakat yang bergantung pada mangrove (Macamo *et al.*, 2024b), serta pengembangan model ekowisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan (SCBET) (Hafezi *et al.*, 2023). Sebagian besar studi terdahulu cenderung berfokus pada model pengelolaan ekowisata yang diinisiasi secara *top-down* atau didukung oleh instrumen hukum formal negara yang sudah mapan, seperti *Community-Based Forest Management Agreement* (CBFMA) di Filipina (Thompson *et al.*, 2017) atau skema tata kelola formal di Sundarbans, Bangladesh (Jashimuddin *et al.*, 2022). Sebaliknya, sangat sedikit penelitian yang mengkaji model pengelolaan yang tumbuh secara organik (*bottom-up*) di tingkat masyarakat lokal dengan memisahkan fungsi konservasi dan fungsi komersial ke dalam dua lembaga komunitas yang berbeda secara struktural. Akibatnya, pemahaman mengenai dinamika konflik internal, ketimpangan distribusi insentif, dan kerentanan regulasi pada model hibrida informal ini masih sangat terbatas.

Penelitian ini bermaksud mengisi gap tersebut dengan mengajukan tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana karakteristik model pengelolaan ekowisata di MKSM berdasarkan kerangka *community-based ecotourism*? (2) Bagaimana konflik kepentingan antar-stakeholder terjadi dan berdampak pada efektivitas pengelolaan MKSM? (3) Bagaimana dampak pengelolaan MKSM terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan ekologi kawasan mangrove? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi teoritis berupa model co-management ekowisata mangrove dengan dualisme kelembagaan, serta rekomendasi praktis bagi pengelolaan ekowisata berbasis komunitas di kawasan pesisir Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas tipologi *community-based ecotourism* dari Walter (2011) dengan membedah tantangan institusional ekowisata berbasis masyarakat yang mengalami transisi tata kelola dari fase kerelawanan (*voluntary*) menuju fase komersialisasi formal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam bentuk pengelolaan, relasi aktor, dan dampak co-management pada Ekowisata Mangrove

Kasih Sayang (MKSM), Mundupesisir, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilakukan di Desa Mundupesisir, Kabupaten Cirebon. Penelitian dilakukan selama 6 bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2024. Desa Mundupesisir terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan luas wilayah 158 Ha dan panjang garis pantai 1,59 km. Kawasan mangrove Kasih Sayang memiliki luas 25 ha (Hidayatullah *et al.*, 2024) dan dimanfaatkan sebagai area ekowisata yang dibuka tahun 2018. Lokasi ini dipilih karena merupakan Kawasan mangrove yang berkembang dari inisiatif rehabilitasi berbasis masyarakat dan kemudian bertransformasi menjadi kawasan ekowisata dengan struktur pengelolaan multipihak.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

2.1. Jenis dan Metode Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan dengan observasi non-partisipan, *indepth interview* (wawancara mendalam) dan studi dokumentasi. Observasi non-partisipan dilakukan untuk mengamati kondisi fisik kawasan, alur aktivitas wisata, pembagian ruang pengelolaan, serta interaksi antar-aktor di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan panduan wawancara yang memuat topik sejarah pengelolaan, peran masing-masing aktor, bentuk kerja sama, konflik kepentingan, mekanisme pengambilan keputusan, sumber pendanaan, distribusi manfaat, serta dampak sosial-ekologis dari pengelolaan. Dokumentasi meliputi dokumen desa, keputusan formal terkait pengelolaan, profil kawasan, laporan kelembagaan, serta literatur ilmiah yang relevan.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam pengelolaan, pengambilan keputusan, dan aktivitas operasional ekowisata. Kriteria inklusi informan meliputi: (1) memiliki pengetahuan langsung mengenai sejarah, tata kelola, atau operasional MKSM; (2) terlibat aktif dalam organisasi pengelola atau pemerintahan desa; dan (3) bersedia memberikan informasi secara mendalam selama proses wawancara. Jumlah informan utama sebanyak Sembilan orang yang terdiri atas ketua Pokmaswas, ketua Pokdarwis, Ketua

Bumdes, anggota bumdes 2 orang, Kepala Desa, jajaran pemerintah desa 2 orang, dan penjaga tiket kawasan mangrove muara Mundu (Tabel 1). Komposisi ini dipilih untuk mewakili aktor kunci yang terlibat dalam aspek konservasi, operasional ekowisata, dan pengelola desa.

Tabel 1. Profil Informan

No	Gender	Profil informan	Data informasi yang didapat
1	Laki-laki	Ketua Pokmaswas	Untuk memahami sejarah ekowisata mangrove Kasih Sayang dan Pengembangannya
2	Laki-laki	Ketua Pokdarwis	Untuk memahami pengembangan dan pengelolaan Ekowisata mangrove Kasih Sayang
3	Laki-laki	Katua Bumdes	Untuk mendapatkan informasi mengenai peran Bumdes bagi Ekowisata Mangrove
4	Laki-laki	Anggota Bumdes	Mengkonfirmasi tugas anggota dalam pengelolaan Ekowisata mangrove sebagai Bumdes
5	Laki-laki	Anggota Bumdes	Mengkonfirmasi tugas anggota dalam pengelolaan Ekowisata mangrove sebagai Bumdes
6	Laki-laki	Kepala Desa	Memberi data tentang status Ekowisata Mangrove Kasih Sayang
7	Laki-laki	Sekdes	Memberi data profil desa dan pengembangan status Ekowisata Mangrove Kasih sayang
8	Laki-laki	Sekdes	Memberi data profil desa dan pengembangan status Ekowisata Mangrove Kasih sayang
9	Laki-laki	Penjaga Tiket Ekowisata	Mendapatkan informasi mengenai pengunjung Ekowisata mangrove Kasih Sayang

Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan para *key informan*, sedangkan data sekunder didapat dari kajian literatur seperti profil desa Mundupesisir, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan ekowisata mangrove Mundupesisir.

2.2. Metode Analisis

Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode tematik dengan tahapan: transkripsi, pembacaan berulang, coding, kategorisasi kode, penarikan tematik, dan interpretasi tematik. Tahapan analisis pada penelitian ini yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Data hasil penelitian awalnya dibagi, dianalisis, dibandingkan, dan dikategorisasikan. Langkah selanjutnya data digabungkan menjadi kategori dan subkategori untuk

dikaitkan dengan analisis. Tahap akhir yaitu penggabungan data kategori lain untuk kemudian disusun menjadi suatu kalimat sistematis. Data kemudian akan dianalisis berdasarkan bagaimana pengelolaan ekowisata mangrove, karakteristik, dan dampak pengelolaannya dengan menggunakan teori Damastuti *et al.*, (2022). Berikut tabel kriteria dan indikator pengelolaan mangrove menurut Damastuti *et al.*, (2022). Kriteria ini dibangun berdasarkan kerangka konseptual dari Datta *et al.* (2010), UNEP-WCMC (2011), Damastuti dan de Groot (2017) serta Morris *et al.* (2014).

Tabel 2. Kriteria dan Indikator Pengelolaan Mangrove (Damastuti *et al.*, 2022)

Komponen	Kriteria
1. Karakteristik Pengelolaan:	
• Pengelolaan komunitas	• Pengorganisasian aksi kolektif setempat
	• Partisipasi lokal
• Strategi Bersama	• Kekuatan daya tawar-menawar masyarakat dalam pengambilan keputusan
	• Strategi rehabilitasi mangrove
• Mendukung Peraturan Lokal	• Strategi Pengelolaan pasca penanaman
	• Atribut dari aturan tersebut
	• Peruntukan dan Larangan
	• Sangsi
2. Dampak Pengelolaan	
• Tutupan mangrove	• Skala rehabilitasi
	• Luas area mangrove
• Structure mangrove	• Tingkat kelangsungan hidup
	• Spesies
• Keanekaragaman Flora dan Fauna	• Kerapatan
	• Kekayaan spesies
	• Indeks keragaman
	• Keseragaman spesies

Selain itu, bentuk ekowisata dianalisis dengan menggunakan *teori community-based ecotourism* dari Walter (2011). Teori ini mengelompokkan bentuk ekowisata menjadi tiga yaitu *authentic ecotourism*, *community-based tourism*, dan *indigeneous ecotourism*. Berikut tabel pengelompokan *community-based ecotourism* menurut Walter (2011).

Validitas dan triangulasi data dilakukan dengan melakukan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi dokumen. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antar-informan dari berbagai posisi kelembagaan. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen resmi. Triangulasi dokumen digunakan untuk memverifikasi data verbal dengan keputusan formal, profil desa, dan sumber tertulis lainnya. Selain itu, peneliti menerapkan *member cheking* untuk mengurangi miskonsepsi interpretasi serta menjaga validitas makna dari pernyataan informan dan untuk meminimalisir subjektivitas peneliti.

Tabel 3. Variasi *Community-Based Ecotourism* (Walter, 2011)

No	Authentic Ecotourism (Honey, 2008)	Community-based Tourism (Suansri, 2004)	Indigenous Ecotourism (Zeppel, 2006)
1	Melibatkan perjalanan ke tujuan wisata alam	Mengakui, mendukung, dan mempromosikan kepeilikan masyarakat akan ekowisata	Berdasarkan system dan nilai pengetahuan masyarakat adat
2	Meminimalisasi dampak lingkungan dan budaya	Melibatkan anggota masyarakat sejak awal dalam setiap aspek	Mempromosikan praktik adat dan mata pencaharian adat
3	Membangun kesadaran lingkungan	Mempromosikan kebanggaan komunitas	Digunakan untuk mempertahankan hak-hak untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan tanah dan sumberdaya tradisional
4	Memberikan manfaat finansial langsung untuk konservasi	Meningkatkan kualitas hidup	Beroperasi di bawah kendali dan partisipasi aktif masyarakat adat setempat
5	Memberikan manfaat finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal	Memastikan keberlanjutan lingkungan	Melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan, pengembangan, dan pengoperasian ekowisata
6	Menghormati budaya lokal	Melestarikan karakter dan budaya unik daerah setempat	Ketentuan perdagangan dinegosiasikan untuk penggunaan sumber daya ekowisata, termasuk manusia
7	Mendukung hak asasi manusia	Mendorong pembelajaran lintas budaya Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia Mendistribusikan manfaat secara adil diantara anggota masyarakat Memberikan kontribusi presentase pendapatan yang tetap kepada proyek masyarakat	

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik dan Tipologi Ekowisata MKSM

Berdasarkan tipologi *community-based ecotourism* yang dikemukakan Walter (2011), MKSM memenuhi karakteristik dua tipologi sekaligus, yaitu *authentic ecotourism* dan *community-based tourism*, yang membentuk model hibrid dengan irisan indikator yang saling memperkuat.

3.1.1. Authentic Ecotourism

MKSM memenuhi hampir seluruh kriteria *authentic ecotourism* yaitu menawarkan pengalaman wisata alam di ekosistem mangrove yang merupakan perjalanan destinasi alam. Ada upaya meminimalisir dampak lingkungan yaitu upaya konservasi dan rehabilitasi yang menunjukkan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh ketua Pokmaswas dalam wawancara:

"Dulu kadang sedimen, kadang abrasi. Tahun 2010 itu masih 0 dan tahun 2021 data yang dicatat oleh dinas kehutanan ada 7 Ha (mangrove)."

MKSM juga terdapat upaya membangun kesadaran lingkungan melalui pentingnya ekosistem mangrove dan peranannya dalam lingkungan, serta memberikan manfaat finansial langsung untuk konservasi meskipun hasil pendapatan masih belum dapat digunakan untuk mendukung program konservasi mangrove dan masih mengandalkan hibah dari pemerintah maupun swasta. Memberikan manfaat finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan melibatkan masyarakat pada pengelolaan yaitu adanya pokdarwis dan pokmaswas. Meski begitu, belum ada edukasi formal untuk pengunjung dan keterlibatan dalam gerakan demokratis belum tersedia. Hal ini sebagaimana Wondirad dan Ewnetu

(2019) yang mengemukakan enam prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ekowisata yaitu mengandalkan alam, memiliki tujuan konservasi, menyediakan pendidikan lingkungan, distribusi manfaat yang adil, dan memiliki tanggung jawab etis terhadap penduduk dan wisatawan serta keberlanjutan.

3.1.2. Community-Based Ecotourism

MKSM menunjukkan kompatibilitas yang kuat dengan indikator *community-based tourism* (Suansri, 2004 dalam Walter, 2011). Kepemilikan dan pengelolaan berbasis komunitas tercermin dalam struktur Pokmaswas dan Pokdarwis yang dikelola oleh warga lokal. Keterlibatan komunitas dalam perencanaan dan operasional wisata juga tampak dari awal inisiasi yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat sejak 2008. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh ketua Pokmaswas yang menyatakan:

"Wisata di dalam konservasi itu kewenangannya Bumdes, tapi pengawasan dan pengembangan hutan itu ada di kewenangan pokmaswas."

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana pembagian kerja informal terbentuk secara organik. Meski begitu, pernyataan tersebut tidak didukung dalam bentuk formalisasi kewenangan yang menciptakan ambiguitas yang kemudian berpotensi memicu konflik. Hal ini sebagaimana disebutkan Nguyen *et al.*, (2022) bahwa *community-based ecotourism* terdiri dari *environmental conservation, cultural conservation, community participation, empowerment, economic benefits*. Adanya Pokmaswas dan Pokdarwis yang mengelola MKSM merupakan bentuk partisipasi komunitas yang merupakan bentuk pengelolaan ekowisata berbasis komunitas. Ketidadaan formalisasi kewenangan pada MSKM

menurut Nguyen *et al.*, (2022) adalah salah satu bentuk kebijakan yang memerlukan kegiatan khusus yaitu ketrampilan manajemen dan komunikasi yang merupakan factor penting untuk mempertahankan dan mengembangkan ekowisata. Karenanya, departemen pariwisata dan pemerintah daerah setempat perlu menyelenggarakan kursus pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat yang menerapkan metode pelatihan partisipatif sehingga masyarakat dengan mudah memahami dan menyerap pengetahuan (Nguyen *et al.*, 2022).

Kondisi tersebut juga menggambarkan sebagaimana argumentasi Lo dan Janta (2020) yang mengemukakan bahwa *community-based* pada ekowisata memerlukan keterlibatan aktif dan pemberdayaan kelompok lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan manfaat kegiatan ekowisata (Lo & Janta, 2020). Lebih lanjut, Teshome *et al.*, (2023) juga menyatakan bahwa secara umum ekowisata berbasis komunitas menghormati hak, praktik budaya, dan spiritual masyarakat adat. Pemimpin masyarakat mampu mengelola pengunjung secara efektif, menginspirasi anggota dan masyarakat lokal untuk berpartisipasi pada pengembangan ekowisata berbasis komunitas (Teshome *et al.*, 2023).

Berdasarkan analisis di atas, MKSM dapat dikategorikan sebagai *hybrid community-based ecotourism model* yang menggabungkan *authentic ecotourism* dengan *community-based tourism*. Irisan kedua tipologi ini mencakup perjalanan ke destinasi alam, minimisasi dampak lingkungan, membangun kesadaran lingkungan, pemberian manfaat finansial untuk konservasi dan komunitas, keterlibatan komunitas pada setiap aspek pengelolaan, peningkatan kualitas hidup, dan distribusi keuntungan yang inklusif. Namun terdapat beberapa indikator yang belum optimal diantaranya belum adanya pelestarian karakter budaya lokal kepada pengunjung, distribusi manfaat yang merata di antara seluruh anggota komunitas, dan kontribusi persentase pendapatan tetap untuk proyek komunitas.

Berdasarkan kriteria dan indikator pengelolaan mangrove yang dikemukakan Damastuti *et al.*, (2022) dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ekowisata MKSM mempunyai karakteristik dikelola oleh komunitas dengan melakukan aksi kolektif untuk merehabilitasi mangrove. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat sehingga komunitas mempunyai daya tawar dalam pengambilan keputusan. Daya tawar ini dapat dilihat pada peran Pokmaswas yang mengelola MKSM. Selain itu, strategi rehabilitasi mangrove dan strategi pengelolaan setelah penanaman mangrove juga dilakukan oleh pokmaswas. Mereka memunculkan regulasi atau peraturan lokal yang membuat larangan dan sanksi bagi masyarakat yang merusak area mangrove bekerja sama dengan pemerintah desa Mundupesisir.

3.2. Bentuk Pengelolaan Ekowisata MKSM: Struktur dan Dinamika Kelembagaan

MKSM merupakan salah satu desa wisata bahari yang ditetapkan direktur jendral pengelolaan ruang laut kementerian kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 53 Tahun 2023 tentang penetapan desa wisata bahari. Keputusan ini menetapkan desa wisata bahari yang berlokasi di 23 desa pesisir di 23 Kabupaten/Kota pada 13 provinsi. MKSM sebelumnya sudah ditetapkan sebagai desa wisata di kabupaten Cirebon berdasarkan keputusan bupati cirebon no.556/Kep.429-DISBUDPAR/2022 tentang penetapan desa wisata di Kabupaten Cirebon. Dalam keputusan tersebut juga disebutkan bahwa desa wisata yang ditetapkan berbasis pemberdayaan masyarakat. Penetapan MKSM sebagai desa wisata bahari kemudian dikuatkan dengan keputusan kuwu mundupesisir No.141.1/Kep-101/Mdp/2024 tentang pengangkatan pengurus bumdes "Karya mandiri sejahtera" desa mundupesisir kecamatan mundu. Kekuatan legal formal ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan kawasan, namun belum diikuti oleh formalisasi peran masing-masing aktor dalam regulasi desa.



Gambar 2. Penetapan MKSM secara Legal Formal

Gambar 2 menunjukkan bahwa MKSM mempunyai kekuatan secara legal formal untuk dikembangkan. Mangrove Kasih Sayang Mundu awalnya merupakan kawasan konservasi yang digagas oleh salah satu tokoh masyarakat setempat yang bernama Nursin. Saat itu, Nursin tergabung dengan salah satu LSM yaitu GMBI yang menginisiasi melakukan penanaman mangrove di desa Mundu Pesisir. LSM tersebut kemudian mengajukan proposal dan bantuan bibit untuk melakukan penanaman dan mendapatkan 1500 bibit mangrove yang ditaman pada tahun 2008. Pada tahun tersebut terdapat dua kelompok yang melakukan penanaman yaitu dari kelompok Pokmaswas dan GMBI. Namun yang berhasil memelihara mangrove sampai tumbuh hanya dari kelompok GMBI yang kemudian tidak lagi terafiliasi dengan LSM tersebut. Tahun 2012 Pokmaswas yang bernama Darmamuda yang beranggotakan 25 orang, kemudian mengalami penyusutan anggota karena ada beberapa anggota tidak terlibat langsung dalam pemeliharaan pohon mangrove. Tahun 2017 Pokmaswas mengalami perubahan anggota menjadi 10 orang dengan alasan efisiensi pengelolaan anggota dan namanya menjadi Darmakencana. Sejak saat itu, pokmaswas ini diketuai oleh Pak Nursin yaitu warga yang berinisiatif menanam mangrove untuk kesejahteraan dan keselamatan lingkungan pesisir desa Mundupesisir. Saat ini, Kawasan hutan mangrove di Desa Mundu Pesisir, terdapat dua pengelolaan yaitu pengelola Kawasan konservasi berada di bawah Pokmaswas Darmakencana dan pengelola ekowisata mangrove berada di bawah BUMDES. Kawasan mangrove kasih sayang berada pada puncak pengujung yaitu tahun 2018 yang ditandai dengan terjualnya 1200 lembar tiket.

Bentuk keterlibatan masyarakat pada ekowisata mangrove di Mundu Kabupaten Cirebon adalah dengan menggunakan sistem co-manajemen. Co-manajemen merupakan pendekatan untuk melibatkan masyarakat pada pengelolaan mangrove yang dapat mengakomodir pengelolaan konflik antara komunitas lokal dengan pemerintah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Begum *et al.*, (2023) bahwa Co-manajemen merupakan salah satu mekanisme pengelolaan yang paling penting dalam pengelolaan sumber daya alam di mana aktor pemerintah dan non pemerintah bekerja sama dalam mengelola sumber daya alam (Begum *et al.*, 2023). Co-manajemen juga merupakan suatu jalan menuju konservasi hutan yang melibatkan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tata kelola dan penebangan hutan yang tidak berkelanjutan serta mendukung penerapan pengetahuan adat masyarakat dan pemantauan hutan Bersama (Jashimuddin *et al.*, 2022) (Mawa *et al.*, 2022). Dengan kata lain, co-manajemen merupakan cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam (Kilonzi & Ota, 2023).

Bentuk pengelolaan co-management pada MKSM ditandai oleh pembagian kewenangan antara dua entitas utama: Pokmaswas Darmakencana yang

bertanggung jawab atas konservasi kawasan mangrove, dan Pokdarwis yang merupakan bagian dari BUMDes 'Karya Mandiri Sejahtera' yang mengelola aspek pariwisata dan perekonomian.

Tabel 4. Matriks Peran dan Kewenangan Stakeholder MKSM

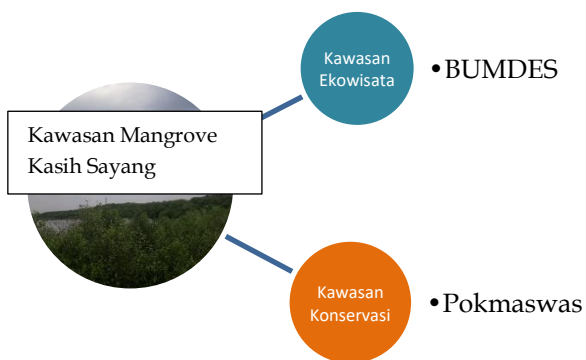
Aktor	Peran Utama	Kewenangan	Sumber Legitimasi
Pokmaswas Darmakencana	Konservasi dan pengawasan kawasan mangrove	Pengawasan, rehabilitasi, penegakan aturan lokal	Kepmen KP No.58/2001; legitimasi komunitas lokal
Pokdarwis	Promosi dan pengembangan wisata	Pemasaran, pengelolaan atraksi wisata	Keputusan desa; dukungan Dinas Pariwisata
BUMDes 'Karya Mandiri Sejahtera'	Pengelolaan bisnis ekowisata	Pengelolaan tiket, pendapatan, fasilitas wisata	Keputusan Kuwu No.141.1/2024
Pemerintah Desa Mundupesisir	Fasilitator dan regulator tingkat desa	Kebijakan desa, alokasi dana desa	UU Desa No.6/2014
Kementerian KP / Pemerintah Kabupaten	Pemberi mandat dan hibah	Regulasi nasional/daerah, program bantuan	Peraturan perundang-undangan nasional

Pokmaswas merupakan sebuah kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan lapangan secara aktif melibatkan masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab. Peran Pokmaswas tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri KP Nomor 58 tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kelautan Perikanan No.58 Tahun 2001 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan dibentuk Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) yang merupakan system pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan peran aktif masyarakat (yang mengakui tradisi atau budaya setempat yang ramah lingkungan). Pihak yang terlibat dalam sistem pengawasan berbasis masyarakat (Siswasmas) adalah masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok sebagaimana pada Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Pasal 67. Siswasmas ini kemudian didigunaka sebagai ukuran bagi para pihak untuk memastikan pemanfaatan sumberdaya agar dapat dirasakan secara berkelanjutan (USAID SEA, 2020).

Pembentukan Pokmaswas sebagai bentuk perwujudan pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menerapkan co-manajemen. Sebagaimana Phong *et al.*, (2023) menyatakan bahwa Co-manajemen ditetapkan tahun 1980 yang mengatur pemerintah berbagi kekuasaan dan tanggung jawab dengan masyarakat yang bergantung pada

sumberdaya alam untuk mencapai pengelolaan sumberdaya yang efektif. Hal ini dikuatkan pula oleh Begum *et al.*, (2023) yang berargumentasi bahwa co-manajemen merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ekosistem dan mendorong hasil pengelolaan bersama yang berkelanjutan. Pada sistem pengelolaan ini, masyarakat setempat atau masyarakat lokal berpartisipasi bersama stakeholder tingkat tinggi dalam sejumlah kegiatan seperti perlindungan hutan, pemantauan, pertemuan, dan pelatihan. Saat menjalankan kegiatan ini, masyarakat setempat dapat menyuarakan pendapat mereka, berkontribusi pada perencanaan dan pelaksanaan, serta memenuhi kebutuhan budaya dan ekonomi agar mereka menjadi bagian yang efektif dalam pengelolaan bersama (Begum *et al.*, 2023). Co-manajemen ada dalam berbagai bentuk diantaranya adalah *community-based natural resource management*, *community-based forest management*, *community-based coastal resource management*, *community-based climate change adaptation*, dan *community-based mangrove management* (Phong *et al.*, 2023).

Phong *et al.*, (2003) juga menyebutkan bahwa co-manajemen sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas yang mendukung co-manajemen dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan mangrove berbasis masyarakat (*community-based mangrove management*) diadopsi di negara-negara berkembang yang beriklim tropis karena skema pengelolaan ini membantu menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi sumberdaya mangrove untuk pembangunan ekonomi seperti di Bangladesh, Brazil timur, Ghana, Indonesia, Thailand, Philipina, dan Kepulauan Pasifik. Bentuk co-manajemen kawasan mangrove di Mundu dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Bentuk Pengelolaan Mangrove Kasih Sayang

Peran komunitas lokal atau masyarakat setempat pada pengelolaan ekowisata mangrove di mundu yaitu pada kegiatan konservasinya sebagai Pokmaswas yang merupakan sistem pengawasan berbasis masyarakat. Peran Pokmaswas yaitu sebagai berikut:

1. Membantu pemerintah dalam pengawasan kawasan konservasi perairan

2. Melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
 3. Membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
 4. Melaporkan tindakan perusakan lingkungan di wilayah pesisir.
 5. Mengisi logbook atau buku harian pokmaswas yang berisi informasi mengenai kegiatan monitoring atau pengawasan, penyuluhan, dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pokmaswas
- Melalui Sismaswas ini, masyarakat dapat berperan dengan cara

- a) Mematuhi aturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumber daya ikan
- b) Membantu sosialisasi aturan untuk membuat masyarakat luas patuh terhadap aturan
- c) Melaporkan tindakan dugaan pencemaran dan atau perusakan sumber daya kelautan dan perikanan
- d) Melaporkan tindakan atau hal-hal yang akan membahayakan atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kelestarian sumber daya
- e) Mendukung pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) dan penegak hukum dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- f) Bersedia memberikan keterangan atau bersaksi dalam perkara penegakan hukum tindak pidana perikanan
- g) Tidak main hakim sendiri

Meski begitu, masih terdapat gap dalam pengelolaan ekowisata mangrove karena tidak disebutkan dalam peraturan desa ataupun regulasi terkait berkaitan dengan peran masing-masing desa, pokmaswas, dan pokdarwis. Hal ini pula yang menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan ekowisata mangrove di Mundupesisir. Padahal ekowisata ini berpotensi mendapatkan hibah baik dari provinsi, kabupaten maupun dari dana desa sendiri, namun sampai saat ini, yaitu beberapa bulan setelah peresmian kembali setelah renovasi dari dana hibah tersebut, Kawasan ekowisata mangrove masih terlihat sepi. Hal ini membutuhkan analisis lebih lanjut untuk merancang strategi pengembangan Kawasan ekowisata dengan pelibatan secara aktif semua pihak, terutama stakeholder pengelola Kawasan ekowisata mundu tersebut.

Konteks Kelembagaan dan Budaya

Secara kelembagaan, MKSM menawarkan konteks yang unik dibandingkan model *community-based mangrove management* di negara lain. Berbeda dengan Filipina yang menggunakan mekanisme *Community-Based Forest Management Agreement* (CBFMA) sebagai instrumen legal formal yang memberikan hak pengelolaan hutan negara kepada masyarakat selama 25 tahun (Pulhin *et al.*, 2024; Thompson *et al.*, 2017), pengelolaan MKSM berjalan tanpa perjanjian formal semacam itu. Pengelolaan bertumpu pada kesepakatan informal antar-komunitas yang tumbuh organik dari sejarah

rehabilitasi mangrove sejak 2008. Absennya dokumen formal ini menjadi salah satu sumber kerentanan kelembagaan yang perlu diatasi. Dari sisi nilai budaya, hubungan manusia-lingkungan masyarakat Mundupesisir—termasuk tradisi *nadran* atau pesta laut—memberikan konteks ekokultural yang memperkuat komitmen komunitas terhadap konservasi mangrove, sekaligus menjadi sumber daya tarik wisata yang potensial namun belum dioptimalkan. Hal itu menunjukkan bahwa MKSM bernilai secara fungsional dan bermakna secara budaya (Song *et al.*, 2021).

Pengelolaan hutan mangrove di Mundupesisir cukup unik dengan dua organisasi berbeda yang dilibatkan dan diberdayakan untuk menjadi pengelola sehari-hari meskipun tidak melalui perjanjian pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau CBFMA. CBFMA merupakan perjanjian pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang ada di Filipina yang memberikan hak atas tanah kepada masyarakat. CBFMA dianggap sangat kondusif untuk implementasi *payment ecosystem services* atau PES (Thompson *et al.*, 2017).

3.3. Analisis Konflik Tata Kelola Antar Stakeholder

Analisis data wawancara mengidentifikasi dua bentuk konflik kepentingan utama di MKSM yang belum ditangani secara sistematis:

Konflik 1: Ketidakjelasan kewenangan antara Pokmaswas dan BUMDes secara legal formal.

Tidak adanya regulasi desa yang secara eksplisit membagi kewenangan antara Pokmaswas (konservasi) dan BUMDes (wisata) menciptakan zona abu-abu dalam pengambilan keputusan. Ketua BUMDes mengungkapkan:

"Kadang kami bingung, fasilitas yang ada di kawasan mangrove ini tanggung jawab siapa kalau rusak. BUMDes yang urus wisata, tapi kawasannya di bawah Pokmaswas. Tidak jelas siapa yang harus bertindak."

Konflik ini mencerminkan gap kelembagaan (institutional gap) yang oleh Begum *et al.* (2023) diidentifikasi sebagai salah satu hambatan utama efektivitas co-management: ketika batas kewenangan antar-aktor tidak terdefinisi dengan jelas, koordinasi menjadi sulit dan tanggung jawab menjadi terpecah.

Konflik 2: Distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata.

Terdapat ketidakjelasan mekanisme bagi hasil antara BUMDes dan Pokmaswas yang menimbulkan persepsi ketidakadilan. Ketidakadilan distribusi ini berpotensi menurunkan motivasi konservasi jangka panjang, sebagaimana sebuah dinamika yang juga ditemukan Phong *et al.* (2023) dalam studi co-management mangrove di Vietnam.

Akar masalah dari kedua konflik ini bermuara pada satu isu struktural yaitu absennya peraturan desa (perdes) atau dokumen kesepakatan formal yang

mengatur peran, kewenangan, mekanisme koordinasi, dan distribusi manfaat antar-aktor. Tanpa regulasi formal ini, resolusi konflik bergantung pada hubungan personal dan kepercayaan informal yang rentan terhadap perubahan kepemimpinan.

3.4. Dampak Pengelolaan: Dimensi Sosial-Ekonomi, dan Ekologi

3.4.1. Dampak Sosial-Ekonomi

Dampak sosial-ekonomi dari pengelolaan MKSM dapat diidentifikasi pada beberapa indikator pada Tabel 5.

Secara kualitatif, ekowisata MKSM telah memberikan dampak positif berupa peningkatan peningkatan potensi ekonomi dan pengakuan identitas lokal sebagai pengelola kawasan konservasi. Pihak Pokdarwis Mundupesisir mengungkapkan:

"Kalau wisata itu sudah berkembang, sudah maju, dengan sendirinya ekonomi kita terangkat, tenang tuh. Alhamdulillah. Dikasih pengertian kayak gitu, akhirnya kan pada sadar".

Meski begitu, pihak Pokmaswas mengungkapkan:

"Lebih baik orang datang kecewa sebelum masuk, dari pada kecewa setelah masuk, iya kan. Walaupun dating dari jauh tetap jangan diijinkan masuk (kawasan mangrove)".

Pernyataan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi wisata yang diakui secara formal dan kapasitas kelembagaan yang belum memadai untuk mewujudkannya—sebuah kondisi yang juga diidentifikasi Nguyen *et al.* (2022) sebagai tantangan utama *community-based ecotourism*, yakni kurangnya keterampilan manajemen dan kesiapan antar pemangku kepentingan.

Tabel 5. Indikator Dampak Sosial-Ekonomi Pengelolaan MKSM

Indikator	Kondisi Saat Ini	Catatan
Penyerapan tenaga kerja lokal	Pokmaswas (10 anggota aktif), Pokdarwis, staf BUMDes	Seluruh pengelola berasal dari masyarakat Mundupesisir
Pendapatan dari tiket wisata	Fluktuatif; puncak 1.200 tiket/hari (2018), menurun signifikan pasca-pandemi	Belum ada data pendapatan terverifikasi terkini
Ketergantungan pada hibah	Masih bergantung pada hibah pemerintah dan swasta untuk konservasi	Program konservasi belum mandiri secara finansial
Distribusi manfaat	Belum merata; mekanisme bagi hasil tidak terdokumentasi	Sumber potensi konflik kelembagaan
Pemberdayaan komunitas	Komunitas memiliki daya tawar dalam pengambilan keputusan melalui Pokmaswas	Namun belum diformalkan dalam regulasi desa

3.4.2. Dampak Ekologi

Dampak ekologi pengelolaan MKSM dapat dievaluasi melalui data kondisi vegetasi mangrove yang tersedia dari tiga periode pengamatan terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Dinamika Kondisi Vegetasi Mangrove MKSM (2021-2024)

Tahun	Jumlah Spesies	Spesies Dominan	Indeks Nilai Penting	Catatan
2021	2	Rhizophora mucronata, Avicennia marina	-	Rehabilitasi masih berjalan (Akbar <i>et al.</i> , 2021)
2023	4	Rhizophora mucronata (dominan)	154,17%; 98,18%	Peningkatan keanekaragaman spesies (Elinah <i>et al.</i> , 2023)
2024	3	Avicennia marina, Rhizophora mucronata, Acrostichum	-	Penurunan 1 spesies (Bruguiera) (Hidayatullah <i>et al.</i> , 2024)

Data pada Tabel 6 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Setelah mengalami peningkatan keanekaragaman spesies antara 2021-2023 (dari 2 menjadi 4 spesies), terjadi penurunan pada 2024 menjadi 3 spesies dengan hilangnya *Bruguiera* dari kawasan. Kondisi ini bertentangan dengan standar ideal konservasi mangrove yang mensyaratkan minimal 3-4 jenis mangrove untuk kawasan yang dikelola secara berkelanjutan (Akbar *et al.*, 2021). Penurunan keanekaragaman ini mengindikasikan bahwa tekanan terhadap kawasan—baik dari aktivitas wisata yang belum teratur maupun dari lemahnya sistem monitoring—mulai berdampak pada kondisi ekologi. Pokmaswas memang menjalankan fungsi pengawasan, namun tanpa sistem monitoring yang terstruktur dan berbasis data, efektivitas konservasi jangka panjang menjadi sulit dipertahankan.

Secara keseluruhan, luas kawasan mangrove MKSM yang mencapai 1.383 Ha dan masuk kategori mangrove rapat menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi yang dimulai sejak 2008 telah berhasil secara kuantitatif. Namun, diversitas spesies yang menurun menjadi sinyal peringatan bahwa kualitas ekologi kawasan memerlukan perhatian lebih serius dalam rencana pengelolaan ke depan.

3.5. Efektivitas Co-Management dan Komparasi dengan Penelitian Serupa

Efektivitas model co-management di MKSM dapat dievaluasi berdasarkan kriteria Damastuti *et al.* (2022) yang mencakup tiga komponen: karakteristik pengelolaan komunitas, strategi bersama, dan dukungan peraturan lokal.

Tabel 5. Evaluasi Efektivitas Co-Management MKSM Berdasarkan Kriteria Damastuti *et al.* (2022)

Komponen	Kriteria	Kondisi di MKSM	Penilaian
Pengelolaan komunitas	Pengorganisasian aksi kolektif lokal	Pokmaswas dan BUMDes beroperasi secara mandiri	Memadai, namun perlu koordinasi lebih baik
	Partisipasi lokal	Seluruh pengelola berasal dari komunitas lokal Pokmaswas memiliki pengaruh dalam konservasi, BUMDes dalam wisata	Kuat
	Daya tawar dalam pengambilan keputusan	Dilakukan Pokmaswas sejak 2008 secara konsisten	Moderat; belum ada forum koordinasi formal
Strategi bersama	Strategi rehabilitasi mangrove		Kuat
	Strategi pengelolaan pasca-penanaman	Patroli rutin, logbook, pelaporan pelanggaran	Cukup, namun belum berbasis data terstruktur
Peraturan lokal	Atribut aturan, peruntukan, larangan, sanksi	Ada larangan dan sanksi informal, belum ada perdes formal	Lemah; ini adalah gap utama yang perlu ditangani

Dibandingkan dengan penelitian serupa, model co-management MKSM memiliki kesamaan dengan studi Macamo *et al.* (2024a) di Mozambik, di mana komunitas lokal menjadi tulang punggung konservasi mangrove dengan dukungan regulasi pemerintah yang minimal. Namun, MKSM berbeda dari model di Bangladesh (Begum *et al.*, 2023) yang telah mengembangkan mekanisme sharing-power yang lebih terstruktur antara komunitas dan pemerintah. MKSM juga berbeda dengan model di Kenya (Kilonzi & Ota, 2023) yang telah menerapkan kerangka 4Rs (Rights, Responsibilities, Revenues, Relationships) dalam tata kelola kawasan konservasi berbasis masyarakat. Kebaruan model MKSM terletak pada co-management yang tumbuh dari inisiatif komunitas bottom-up tanpa perjanjian formal, dalam konteks regulasi desa wisata bahari yang masih baru di Indonesia.

Dari sisi kontribusi teoritis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa model co-management yang efektif tidak hanya memerlukan partisipasi komunitas yang kuat—yang telah dimiliki MKSM—tetapi juga memerlukan formalisasi kelembagaan yang jelas (institutional formalization), sebagaimana diargumentasikan oleh Phong *et al.* (2023). Tanpa formalisasi ini, model co-management yang semula kuat secara informal menjadi rentan terhadap konflik laten dan inefisiensi koordinasi jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis *community-based* pada pengelolaan Ekowisata Mangrove Kasih Sayang Mundupesisir (MKSM) sebagai studi kasus *community-based ecotourism* dengan karakteristik dualisme kelembagaan yang unik. Berdasarkan analisis data, tiga simpulan utama dapat dikemukakan.

Pertama, MKSM menerapkan model co-management hibrid yang memadukan *authentic ecotourism* dan *community-based tourism* (Walter, 2011), dengan struktur tata kelola ganda antara Pokmaswas (konservasi) dan BUMDes (pariwisata) yang tumbuh secara organik dari inisiatif komunitas. Model ini berhasil membangun fondasi konservasi mangrove yang kuat—terbukti dari pertumbuhan kawasan mangrove menjadi 1.383 Ha dalam kategori rapat—dan memberdayakan komunitas lokal sebagai aktor pengelola utama.

Kedua, gap kelembagaan merupakan tantangan struktural paling kritis di MKSM. Absennya peraturan desa yang secara eksplisit mengatur pembagian peran, kewenangan, mekanisme koordinasi, dan distribusi manfaat antara Pokmaswas, Pokdarwis, dan BUMDes menciptakan ketidakjelasan dan memunculkan konflik. Gap ini merupakan hambatan utama bagi pengembangan ekowisata yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Ketiga, dampak ekologi menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: setelah peningkatan keanekaragaman spesies mangrove antara 2021-2023 (dari 2 menjadi 4 spesies), terjadi penurunan pada 2024 menjadi 3 spesies. Pola ini mengindikasikan bahwa tekanan terhadap kawasan—baik dari aktivitas wisata maupun dari lemahnya sistem monitoring berbasis data—mulai berdampak pada kualitas ekologi.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dengan mempresentasikan model co-management ekowisata mangrove berbasis *institutional dualism formal-informal* yang tumbuh dari inisiatif komunitas tanpa perjanjian formal, sebuah bentuk kelembagaan yang belum banyak didokumentasikan dalam literatur *community-based ecotourism* di Indonesia. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas co-management memerlukan dua pilar yang saling melengkapi yaitu kekuatan partisipasi komunitas (telah dimiliki MKSM) dan formalisasi kelembagaan yang jelas.

4.1. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi praktis dan kebijakan diusulkan. Pemerintah Desa Mundupesisir perlu segera menetapkan Peraturan Desa yang secara operasional mengatur pembagian peran antar Pokmaswas, Pokdarwis, dan BUMDes melalui deskripsi tugas yang jelas, sistem koordinasi berbasis SOP, skema bagi hasil yang transparan dan berkeadilan. Regulasi ini perlu disusun secara partisipatif dan diikuti dengan sosialisasi intensif agar mampu mereduksi konflik dan

meningkatkan akuntabilitas. Untuk mendukung implementasi tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon perlu menyelenggarakan program *capacity building* terstruktur yang mencakup pelatihan manajemen ekowisata, pemasaran digital berbasis praktik langsung, serta pengembangan paket wisata edukatif, dengan target peningkatan kunjungan, kualitas layanan, dan eksistensi digital MKSM yang terukur. Di sisi lain, penguatan aspek ekologis dan koordinasi operasional perlu dilakukan secara simultan agar keberlanjutan kawasan tetap terjaga. Sementara itu, Pokmaswas dan BUMDes perlu menginstitusionalisasikan rapat koordinasi bulanan dengan agenda tetap (evaluasi kawasan, laporan keuangan, dan rencana kerja) serta sistem pelaporan transparan untuk memperkuat sinergi antar aktor.

4.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagai studi kasus tunggal, temuan yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasi secara statistik ke konteks ekowisata mangrove lainnya, meskipun transferabilitas analitik masih dimungkinkan pada kasus dengan karakteristik serupa. Kedua, data kondisi ekologi yang digunakan berasal dari studi sekunder yang tidak dirancang secara khusus untuk penelitian ini, sehingga komparabilitas lintas periode memiliki keterbatasan metodologis yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil. Keterbatasan tersebut sekaligus membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan kontekstual. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi *Perdes* tata kelola ekowisata, mengembangkan model pembiayaan konservasi mandiri seperti *payment for ecosystem services* (PES), serta mengkaji dimensi gender dalam tata kelola MKSM. Dengan demikian, diharapkan penelitian ke depan dapat menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, R. N., Putri, A., Hartanti, A. N., Negari, S. I. T., Pratama, M. S. R., Zuaini, P. A. K., Al Madani, A. R., Muryanto, B. S., Muhammad, F., Astikasari, L., Indriyani, S., Kurniawati, I., Sunarto, S., Kusumaningrum, L., Budiharta, S., Flores, A. B., & Setyawan, A. D. (2023). Ecotourism development as a community-based conservation effort in Ayah Mangrove Forest, Kebumen, Central Java, Indonesia. *Asian Journal of Forestry*, 7(1).
<https://doi.org/10.13057/asianjfor/r070105>
- Aji, K. B., Salouw, E., Darajat, I. R., Irdana, N., & Sushartimi, W. (2024). Mangrove Ecotourism Research Progress, Trends, And Updates: A Bibliometric Analysis Based on the Scopus and Web of Science Databases. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 52(1), 49–64.
<https://doi.org/10.30892/gtg.52105-1182>
- Akbar, M. R., Abimanyu, A., Faid, G. M., Izza, M. Y. N., As-Syahriraand, Z. N., & Febriani, C. (2021). Suitability analysis of mangrove conversation areas in Mundu District, Cirebon Regency using Geographic

- Information Systems (GIS). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 944(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/944/1/012040>
- Akram, H., Hussain, S., Mazumdar, P., Chua, K. O., Butt, T. E., & Harikrishna, J. A. (2023). Mangrove Health: A Review of Functions, Threats, and Challenges Associated with Mangrove Management Practices. *Forests*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/f14091698>
- Begum, F., de Bruyn, L. L., Kristiansen, P., & Islam, M. A. (2023). Development pathways for co-management in the Sundarban mangrove forest: A multiple stakeholder perspective. *Forest Policy and Economics*, 148, 102918. <https://doi.org/10.1016/j.FORPOL.2023.102918>
- Blanton, A., Ewane, E. B., McTavish, F., Watt, M. S., Rogers, K., Daneil, R., Vizcaino, I., Gomez, A. N., Arachchige, P. S. P., King, S. A. L., Galgamuwa, G. A. P., Peñaranda, M. L. P., al-Musawi, L., Montenegro, J. F., Broadbent, E. N., Zambrano, A. M. A., Hudak, A. T., Swangiang, K., Valasquez-Camacho, L. F., ... Mohan, M. (2024). Ecotourism and mangrove conservation in Southeast Asia: Current trends and perspectives. *Journal of Environmental Management*, 365, 121529. <https://doi.org/10.1016/j.JENVMAN.2024.121529>
- Come, J., Peer, N., Nhamussua, J. L., Miranda, N. A., Macamo, C. C., Cabral, A. S., Madivadua, H., Zacarias, D., Narciso, J., & Snow, B. (2023). A socio-ecological survey in Inhambane Bay mangrove ecosystems: Biodiversity, livelihoods, and conservation. *Ocean and Coastal Management*, 244. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106813>
- Damastuti, E., de Groot, R., Debrot, A. O., & Silvius, M. J. (2022). Effectiveness of community-based mangrove management for biodiversity conservation: A case study from Central Java, Indonesia. *Trees, Forests and People*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2022.100202>
- Elinah, E., Khaerudin, R. B., & Nurlaeli, N. (2023). Study Of Mangrove Vegetation in the Kasih Sayang Mangrove Zone Area, Mundu Coastal Village, Mundu District, Cirebon Regency. *Barakuda'45: Jurnal Ilmu Perikanan Dan Kelautan*, 5(2), 204–212. <https://doi.org/10.47685/barakuda45.v5i2.416>
- Hafezi, F., Bijani, M., Gholamrezai, S., Savari, M., & Panzer-Krause, S. (2023). Towards sustainable community-based ecotourism: A qualitative content analysis. *Science of The Total Environment*, 891, 164411. <https://doi.org/10.1016/j.SCITOTENV.2023.164411>
- Hidayat, A., Budiastuti, M. T. S., Trihatmoko, E., Danardono, D., & Ainurrohman, D. (2024). The potential of community-based ecotourism development with an ecosystem service approach: a case study of Kaliwlingi Village, Brebes, Indonesia. *Environment, Development and Sustainability*, 1–21. <https://doi.org/10.1007/S10668-023-04380-W/METRICS>
- Hidayatullah, M. F., Abdurrahman, U., Pratyaksa, I. F., Radjawane, I. M., & Park, H. S. (2024). Comparison of UAV and WorldView-3 Imagery for Mangrove Species Mapping in Mundupesisir Coastal, Cirebon. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1350, 1–10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1350/1/012043>
- Inoco, M., & Villegas, J. (2024). Local tourists' perception towards mangrove forest conservation and regeneration in the Guang-guang Mangrove Park and Nursery, Davao Oriental, Philippines. *Davao Research Journal*, 15(1). <https://doi.org/10.59120/dri.v15i1.148>
- Jashimuddin, M., Islam, K. N., & Nath, T. K. (2022). Local level forest governance and conservation outcomes in a co-managed protected area of Bangladesh. *Journal of Sustainable Forestry*, 41(3–5), 302–318.
- Juliana, J., Oktaria Sihombing, S., & Esther Suwu, S. (2023). Management Community-Based Ecotourism in Sawarna Tourism Village. *Enrichment: Journal of Management*, 13(1).
- Kilonzi, F. M., & Ota, T. (2023). Application of the 4Rs framework towards effective co-management of protected forests: case of aberdare forest in central Kenya. *Environment, Development and Sustainability*, 25(8), 8561–8584.
- Lo, Y.-C., & Janta, P. (2020). Resident's Perspective on Resident's Perspective on Developing Community-Based Tourism-A Qualitative Study of Muen Ngoen Kong Community. *Frontiers in Psychology*, 11, 1493. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01493>
- Macamo, C. da C. F., Inácio da Costa, F., Bandeira, S., Adams, J. B., & Balidy, H. J. (2024a). Mangrove community-based management in Eastern Africa: experiences from rural Mozambique. *Frontiers in Marine Science*, 11. <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1337678>
- Macamo, C. da C. F., Inácio da Costa, F., Bandeira, S., Adams, J. B., & Balidy, H. J. (2024b). Mangrove community-based management in Eastern Africa: experiences from rural Mozambique. *Frontiers in Marine Science*, 11. <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1337678>
- Mafaziya Nijamdeen, T. W. G. F., Ratsimbazafy, H. A., Sunanda Kodikara, K. A., Nijamdeen, T. W. G. F. A., Thajudeen, T., Peruzzo, S., Govender, M., Dahdouh-Guebas, F., & Hugé, J. (2024). Delineating expert mangrove stakeholder perceptions and attitudes towards mangrove management in Sri Lanka using Q methodology. *Environmental Science and Policy*, 151. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.103632>
- Mawa, C., Babweteera, F., & Tumusiime, D. M. (2022). Livelihood outcomes after two decades of co-managing a state forest in Uganda. *Forest Policy and Economics*, 135, 102644.
- Mohamed, M. K., Adam, E., & Jackson, C. M. (2023). Policy Review and Regulatory Challenges and Strategies for the Sustainable Mangrove Management in Zanzibar. *Sustainability*, 15(2), 1557. <https://doi.org/10.3390/su15021557>
- Nguyen, T. D., Hoang, H. D., Nguyen, T. Q., Fumikazu, U., Thi Vod, T. P., & Nguyen, C. Van. (2022). A multicriteria approach to assessing the sustainability of community-based ecotourism in Central Vietnam; APN Science Bulletin Asia-Pacific Network for Global Change Research. *APN Science Bulletin*, 12(1), 123–140. www.apn-gcr.org/bulletin
- Phong, N. T., Nuong, C. T., & Quang, N. H. (2023). Local perceptions of mangrove protection and livelihood improvement in Co-management: Lessons learnt and recommendations. *Ocean & Coastal Management*, 237, 106530. <https://doi.org/10.1016/j.OCECOAMAN.2023.106530>
- Pulhin, J. M., Ramirez, M. A. M., Garcia, J. E., Pangilinan, M. J. Q., Evaristo, M. B. S., Catudio, M. L. R. O., Magpantay, A.

- T., Tasico, S. L., Pulhin, F. B., Abes, J. L., & Mariano, B. J. S. (2024). Contextualizing sustainable forest management and social justice in community-based forest management (CBFM) program in the Philippines. *Trees, Forests and People*, 16, 100589. <https://doi.org/10.1016/j.TFP.2024.100589>
- Runya, R. M., Karani, N. J., Muriuki, A., Maringa, D. M., Kamau, A. W., Ndomasi, N., Njagi, K., Munga, C., & Okello, J. A. (2022). Local perceptions, opportunities, and challenges of community-based ecotourism in Gazi Bay, Kenya. *Western Indian Ocean Journal of Marine Science*, 21(2), 95–108. <https://doi.org/10.4314/wiojms.v21i2.9>
- Swangjang, K., & Kornpiphat, P. (2021). Does ecotourism in a Mangrove area at Klong Kone, Thailand, conform to sustainable tourism? A case study using SWOT and DPSIR. *Environment, Development and Sustainability*, 23(11), 15960–15985. <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01313-3>
- Teshome, E., Aberaw, G., Tesgera, D., & Abebe, F. (2023). The untold tourism potentials of Bela Mountain, for community-based-ecotourism development, ecosystem conservation and livelihood improvement, Waghimera Zone, Ethiopia. *Environment, Development and Sustainability*, 25(5), 3923–3944. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02223-8>
- Thompson, B. S. (2022). Ecotourism anywhere? The lure of ecotourism and the need to scrutinize the potential competitiveness of ecotourism developments. *Tourism Management*, 92, 104568. <https://doi.org/10.1016/j.TOURMAN.2022.104568>
- Thompson, B. S., Primavera, J. H., & Friess, D. A. (2017). Governance and implementation challenges for mangrove forest Payments for Ecosystem Services (PES): Empirical evidence from the Philippines. *Ecosystem Services*, 23(November 2016), 146–155. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.12.007>
- Tien, N. D., Lam Duyen, T. N., Thanh Huyen, N. T., Anh, P. Q., Oanh, N. T., Tich, V. Van, Dat, D. T., Hong Hanh, N. T., & Trang, V. H. (2024). Community-based ecotourism for sustainability: An evaluative analysis of Binh Son district, Quang Ngai province in Vietnam. *Social Sciences and Humanities Open*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100807>
- Treephan, P., Visuthismajarn, P., & Isaramalai, S.-A. (2019). A Model of Participatory Community-Based Ecotourism and Mangrove Forest Conservation in. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 8(5), 1–8.
- Walter, P. (2011). Gender analysis in community-based ecotourism. *Tourism Recreation Research*, 36(2), 159–168. <https://doi.org/10.1080/02508281.2011.11081316>
- Wibisono, G., Sardjono, M. A., Rujehan, R., & Suhardiman, A. (2024). Community Attitudes towards Mangrove Management in Teluk Sulaiman Village, Berau Regency, Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 11(3), 240–249. <https://doi.org/10.22500/11202350666>
- Zheng, B., Li, M., Yu, B., & Gao, L. (2021). The future of community-based ecotourism (Cbet) in china's protected areas: A consistent optimal scenario for multiple stakeholders. *Forests*, 12(12). <https://doi.org/10.3390/f12121753>